

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PDI PERJUANGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2016 (STUDI KASUS DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN KULON PROGO)

Dalam penelitian ini yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kepada Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo akan membahas dan menganalisis peranan partai dalam pendidikan politik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan.

1. Pendidikan Politik

A. Pendidikan Politik melalui Dimensi Ideologis

Masyarakat dididik untuk berpolitik sesuai dengan azas Pancasila dan UUD 1945. Guna menumbuhkan idealisme yang terkandung dalam Pancasila yang bisa memberikan optimisme dan motivasi terhadap masyarakat seperti yang sudah tertera dalam Undang – Undang tentang pendidikan politik. Serta meningkatkan kualitas kesadaran politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik menurut UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya adalah seluruh partai politik yang terdapat di Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menyampaikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, yang nantinya bisa dijadikan sebagai ajang pengkaderanisasi partai politik yang bersangkutan. Pendidikan politik adalah bukti nyata terhadap kepedulian serta keseriusan dari partai politik dalam menciptakan masyarakat yang melek akan politik. Tumbuh kembangnya demokrasi di negara ini

tergantung terhadap kemampuan dan proses yang dilaksanakan oleh partai politik untuk mewujudkan pendidikan politik yang terbaik bagi kader dan para anggotanya.

Dalam menyampaikan pendidikan politik tidak lupa juga untuk menyampaikan ideologi partai yaitu PDI Perjuangan, nilai – nilai perjuangan partai, visi dan misi partai apa yang dilakukan juga yang akan dilakukan. Materi – materi yang menjadi acuan untuk melakukan pendidikan politik. Proses pelaksanaan pendidikan politiknya sendiri dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi ada juga yang dilakukan secara rutin, dalam satu tahun dilakukan sebanyak 3 kali. Namun, ada juga kegiatan yang dilakukan secara tidak resmi seperti menyelipkan materi pendidikan politik dalam acara – acara partai. Seperti rapat partai, rapat kerja, musyawarah cabang serta musyawarah daerah. Jadi pendidikan politik dilaksanakan juga tidak khusus dalam acara sosialisasi tentang pendidikan politik saja, namun juga dilaksanakan pada saat – saat pertemuan dan acara rutin partai yang dihadiri oleh para kader dan anggota juga.

Bapak Sudarto (2017) menyampaikan apabila terdapat 5 konsep dasar dalam pendidikan politik.

a. Konsep Dasar Dalam Pendidikan Politik

1. Konsep Dasar

Konsep dasar adalah ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila, seluruh masyarakat harus menanamkan setiap poin dalam Pancasila. Dengan begitu masyarakat tidak akan lupa dengan karakter bangsanya dan menjunjung tinggi apa yang disampaikan dalam Pancasila.

2. Konsep Rasa

Konsep yang kedua adalah rasa, yaitu antara pemimpin dan yang dipimpin memiliki rasa tanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya. Seorang pemimpin juga harus memiliki rasa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang amanah dan untuk rakyat.

3. Kemauan

Yang dimaksud dengan kemauan ini adalah kemauan dari masyarakat untuk lebih maju. Maju dalam hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

4. Berkarya

Konsep keempat adalah berkarya, antara kemauan dan berkarya ini saling berkesinambungan. Karena jika masyarakat ada kemauan untuk lebih maju maka mereka akan melakukan hal – hal atau menciptakan karya yang akan bermanfaat.

5. Kemampuan mengelola maupun menguasai teknologi.

Konsep yang terakhir adalah mampu mengelola atau menguasai teknologi, saat ini teknologi sudah sangat maju. Jika masyarakat tidak mampu untuk menggunakan teknologi maka akan tertinggal. Kemampuan menguasai teknologi ini juga didukung dengan adanya fasilitas yang tersedia maka masyarakat akan bisa mengembangkan dirinya untuk menggunakan teknologi. Namun, masyarakat juga harus dapat memilah dan memilih mana yang menunjang kemajuan teknologi dan mana kemajuan teknologi yang tidak bermanfaat.

Lima konsep dasar tersebut harus menjadi hal yang mengendap dalam pemikiran setiap orang masyarakat Indonesia, jika tidak kita akan ketinggalan dengan bangsa yang lain.

Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo mesosialisasikan dan mengkonsolidasikan tentang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dasar negara Indonesia serta hak dan kewajiban serta tanggungjawab warga Indonesia sebagaimana yang tertera di Undang – Undang tentang Partai Politik. Masalah yang dihadapi saat ini oleh partai politik khususnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo adalah mengenai generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini lebih mementingkan *HP (Handphone)*. Hal tersebut yang seharusnya diluruskan, bahwa mereka adalah kader bangsa yang memiliki hak dan kewajiban di negara ini.

Selain itu, pendidikan politik juga disampaikan kepada para kader perempuan untuk menunjang perempuan yang lebih pro-aktif terhadap kegiatan yang bersifat politik. Partisipasi perempuan dalam ranah politik tidak akan mendapatkan hasilnya apabila partai politik tidak melakukan kegiatan dan upaya – upaya yang maksimal dalam memberdayakan perempuan dalam bidang politik guna menunjang perempuan yang lebih pro- aktif dalam kegiatan politik. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas kinerja perempuan dan kepemimpinan perempuan lewat sosialisasi dan pelatihan yang diadakan yang juga berguna untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan. Karena kapasitas perempuan dalam ranah politik cukup rendah dalam pendidikan dan kondisi sosial budaya serta agama yang beberapa waktu ini seakan dipinggirkan dan didiskriminasikan. Maka dari itu diadakanlah kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik

1. Kegiatan pendidikan politik kader perempuan tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

- Kecamatan Nanggulan
- Kecamatan Girimulyo
- Kecamatan Lendah
- Kecamatan Galur

Dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk kader perempuan ini, konsep yang diberikan tidak banyak berbeda dengan kegiatan sosialisasi pendidikan politik. Dalam kegiatan ini disampaikan visi dan misi dari partai yang bersangkutan yaitu PDI Perjuangan. Selain itu disampaikan pula ideologi partai yaitu PDI Perjuangan, nilai – nilai perjuangan partai dan apa yang dilakukan juga yang akan dilakukan.

Kader perempuan dari DPC PDI Perjuangan ini disatukan dalam paguyuban yang bernama *Sri Kandi PDI Perjuangan*. Mereka bergerak dibidang sosial seperti kegiatan outbond bersama, melakukan bakti sosial, sosialisasi serta kegiatan – kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan kepartaian.

Menurut *Anugrah* (2009: 30 – 31) yang dikutip oleh Amirullah mengatakan bahwa :

“Setiap partai politik hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan, dan memajukan kaum perempuan terutama konstituennya. Jika kader-kader partai dari kalangan perempuan masih relatif lebih terbelakang dibanding dengan kaum pria, sedangkan perempuan merupakan aset dalam organik partai, tugas partai adalah menjadikan kaum perempuan sebagai sumber daya elit partai. Kaum perempuan harus diproses supaya siap dalam lingkaran elit partai. Proses yang ditempuh adalah bagaimana supaya kaum perempuan

menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan memiliki jati diri.”

2. Sekolah Partai

Pendidikan politik formal yang juga diberikan adalah sekolah partai, dalam sekolah partai dari anggota, kader (seperti kader Madya Pratama dan kader Utama), simpatisan dan calon pemimpin dididik. Dalam setiap pendidikan politik yang diberikan materinya juga berbeda – beda. Isi dari materi pendidikan politik tersebut tidak jauh – jauh dari pentingnya pengembangan bagi NKRI, kebhinekaan, Pancasila dan juga Undang – Undang Dasar 1945 dan juga ideologi partai. Sekolah partai tersebut ditujukan untuk para anggota, kader dan juga para calon kepala daerah. Sekolah partai sendiri merupakan kegiatan yang diberikan oleh PDI Perjuangan pusat. Namun terkadang juga dilaksanakan sekolah partai untuk wilayah DIY. Para calon pemimpin yang maju melalui PDI Perjuangan diberikan sekolah partai agar lebih dalam mengetahui seluk beluk dunia politik. Kegiatan sekolah partai ini terakhir dilakukan pada tahun 2017 ini yang diadakan di Kaliurang dan ditujukan untuk para calon pemimpin daerah.

Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dalam mencari sosok calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi – aspirasi dari masyarakat. Dengan semboyan partai yaitu *partainya wong cilik* ini para kader maupun simpatisan mengadakan *public hearing* baik itu dalam sebuah acara maupun mendatangi para masyarakat. Setelah mendapatkan semua aspirasi tersebut diakumulasikan dan disimpulkan menjadi sebuah visi dan misi yang akan disodorkan kepada calon pemimpin. Apabila calon pemimpin tersebut merasa cocok dengan visi misi itu maka akan diajukan

sebagai calon pemimpin dari partai dan diikutsertakan dalam sekolah partai.

Hasil dari kegiatan sosialisasi pendidikan politik baik itu bagi kader perempuan dan sekolah partai adalah meningkatkan kesadaran politik bagi para kadernya, dengan begitu partai yang bersangkutan bisa berkembang dan termasuk dalam melayani masyarakat dengan melahirkan para kader dan calon pemimpin yang bertanggungjawab serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemimpin.

B. Pendidikan Politik melalui Dimensi Struktural

Dengan adanya pendidikan politik tersebut diharapkan bagi setiap individu dapat mengerti dan memahami nilai – nilai terstruktur yang ada dalam sistem politik yang saat ini diterapkan. Kemudian dengan adanya pendidikan politik ini masing – masing individu tidak sekedar mengetahuinya saja tetapi bisa lebih menjadi warga negara dengan kesadaran politik yang tinggi dan dapat mengemban tanggungjawab yang ditujukan dengan adanya perubahan dalam peningkatan partisipasi dalam kancah politik serta perubahan sikap setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh *Rusadi Kantaprawira* (1988: 54) mengatakan bahwa :

“ Upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.”

Proses kegiatan pendidikan politik yang terstruktur ini dapat menunjang minat dari masyarakatnya sendiri. Mereka akan lebih tertarik dengan kegiatan yang tidak membosankan dan hanya sekedar duduk dan mendengarkan saja. Terutama kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang diberikan untuk generasi muda juga diadakan dengan lebih semenarik mungkin. Seperti halnya mengaitkan sosial media dengan pendidikan politik, sosialisasi bagaimana menggunakan

sosial media dengan baik dan tidak menerima secara mentah informasi yang didapatkan melalui sosial media tersebut terutama tentang berita politik. Banyaknya berita *hoax* yang tersebar di sosial media itulah yang sering dijumpai oleh para generasi muda yang menggunakan sosial media. Mereka harus lebih bijaksana dalam menerima berita – berita tersebut agar tidak termakan oleh berita yang belum tentu ada kebenerannya.

Dengan menumbuhkan rasa nasionalisme di masing – masing individu bisa meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia politik tidak hanya saat pesta demokrasi saja, tetapi juga terjun langsung dalam kegiatan politik juga yang nantinya bisa membuat progress yang baik dalam kancah politik maupun memajukan Indonesia. Karena politik berhubungan langsung dengan berbagai elemen dalam kehidupan seperti misalnya sosial dan ekonomi. Seperti yang ada dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda bahwa pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Penyampaian pendidikan politik terutama kepada generasi muda disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh generasi muda dan tidak mendoktrinnya secara berlebihan, karena akan berakibat pada generasi muda di Indonesia yang fanatik, kaku dan memiliki pandangan atau wawasan yang sempit. Sedangkan kualitas dari sebuah demokrasi itu sendiri adalah demokrasi yang dapat mewujudkan cita – cita Negara sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke – 4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Yang memiliki arti bahwa dengan menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan benar terutama kepada generasi muda di Indonesia. Maka dari itu dibentuk miniatur keberhasilan Negara dalam segala aspek, generasi muda Indonesia yang belum bisa memahami pemahaman atau pengertian dari politik bisa dikatakan mereka adalah generasi muda yang kurang bisa mengikuti perkembangan zaman atau sedikit ketinggalan *trend*. Karena politik saat ini bukanlah ilmu yang akan meracuni kehidupan kita saat ini maupun nanti dimasa mendatang. Politik akan baik apabila dijalankan secara benar dan sesuai dengan demokrasi Negara serta akan terasa penuh tuntutan apabila dijalankan atau dimaknainya politik tersebut dari sisi negatifnya saja.

Semua elemen masyarakat wajib mendapatkan pendidikan politik, karena selain telah diatur dalam Undang – Undang tentang partai politik juga ada dalam Instruksi Presiden juga. Hal tersebut mematahkan anggapan bahwa politik hanyalah persoalan bagi orang dewasa saja. Semua kalangan dan elemen masyarakat berhak mendapatkan pendidikan politik. Partai politik cukup dengan menyediakan wadah untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan politik tersebut bagi semua kalangan. Disediakkannya acara yang tidak kaku agar setiap kalangan bisa dengan mudah memahami dan mengerti apa yang disampaikan dari moderator. Berbagai event yang bias dilaksanakan dari pihak partai politik yang

menarik masyarakat untuk mengikutinya. Namun, dalam menyampaikan pendidikan politik juga dibedakan antara kader, simpatisan dan masyarakat (termasuk untuk para pemilih pemula).

Dalam mensosialisasikan tentang pendidikan politik, masyarakat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kader, simpatisan dan konstituen (termasuk pemilih pemula). Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo simpatisan partai maupun anak ranting partai kurang lebih berjumlah 4502 orang. Sedangkan untuk kadernya sendiri terdiri dari 38 orang sebagai pengurus DPC (Kabupaten) dan PAC (Kecamatan). Untuk pemilih pemula di Kabupaten Kulon Progo cukup banyak yaitu sekitar 15.000 pemilih pemula.

Maka dari itu dalam pelaksanaan sosialisasi terkait pendidikan politik dibedakan antara untuk masyarakat umum seperti para pemilih pemula, untuk simpatisan dan para kader termasuk untuk calon pemimpin dan legislatif yang akan maju melalui Partai PDI Perjuangan.

Generasi muda Indonesia merupakan aset bagi bangsa ini yang nantinya akan melanjutkan perjuangan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat untuk menuju demokrasi yang nantinya berkualitas. Maka dari itu sebagai calon penerus bangsa ini dalam pengambilan kebijakan dan pemegang kekuasaan, generasi muda seharusnya dijauhkan dari politik yang tidak sehat yang nantinya akan merusak negara ini.

a. Sasaran Dari Pendidikan Politik

Sasaran dari pendidikan politik ini adalah semua elemen masyarakat, baik itu dari generasi muda, dewasa maupun lansia. Sebagai kader partai politik yaitu PDI Perjuangan dan sebagai kader bangsa harus menyiapkan pembangunan

bangsa dan negara ini sebagaimana orang yang beragama harus sejahtera dunia dan akhirat, yang berarti kita harus mendapatkan dan memiliki 2 pendidikan yaitu pendidikan tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila dan keterampilan serta kemampuan membangun bangsa dan negara. Dalam setiap kegiatan partai sering dimasukkan dari berbagai elemen masyarakat. Seperti dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) salah satu materinya juga diselipkan tentang materi pendidikan politik. Dalam Rakercab tersebut yang diundang tidak hanya struktur partai DPC, PAC serta Ranting namun juga ada dari masyarakat. Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pelajar dan mahasiswa.

Masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia) dan memiliki tingkat ekonomi yang rendah menjadi sasaran untuk diberikannya sosialisasi tentang pendidikan politik. Karena mereka juga menjadi lahan basah bagi para calon yang sedang bertarung di pemilu. Jika pemahaman tentang pendidikan politik masih rendah akan sangat mudah disusupi oleh para calon untuk dibeli hak pilihnya.

C. Pendidikan Politik melalui Dimensi Prosedural

Masyarakat diharapkan menjadikan politik sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan aspirasinya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menuangkan aspirasi. Dengan disampaikannya pentingnya pendidikan politik ini diharapkan tingkat kesadaran politik masyarakat meningkat dan turut andil dalam proses maupun kegiatannya.

Pendidikan politik sama halnya seperti pendidikan formal yang setiap individu harus dapatkan, karena dengan semakin majunya teknologi saat ini sosial media juga semakin marak. Banyak penyebaran berita “*hoax*” atau berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebar luas melalui sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, *Intagram* dan sosial media yang lainnya. Saat ini sosial media sangatlah mudah

diakses oleh masyarakat dari yang muda hingga dewasa, dimanapun dan kapanpun. Penyebaran berita *hoax* ini terlebih mengenai politik sangatlah merisaukan masyarakat. Banyak sekali akun yang menyebarkan berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jika masyarakat tidak melek akan politik, mereka sangatlah mudah termakan berita *hoax* tersebut. Pendidikan politik bagi masyarakat yang terkonsep akan mudah dipahami oleh masyarakat, setiap individu memiliki konsep – konsep yang berbeda untuk menyampaikan seberapa pentingnya pendidikan politik tersebut. Apalagi dengan maraknya sosial media ditambah lagi keadaan politik di Indonesia saat ini.

Salah satu cara yang mudah dilakukan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi tersebut diadakan dengan semenarik mungkin untuk menarik minat masyarakat agar pendidikan politik tersebut juga dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh *Alfian* (1986: 235) mengatakan bahwa :

”Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.”

Sosialisasi terutama diberikan untuk kalangan remaja atau generasi muda, karena mereka pengguna aktif sosial media. Melalui sosial media sangatlah mudah menemukan berita *hoax* baik itu positive maupun negative. Contohnya seperti di Instagram yang saat ini menjadi sosial media yang sangat digandrungi oleh kalangan remaja. Di *Instagram* mudah ditemukan akun dengan isi yang menjatuhkan lawan politik lainnya. Padahal dalam postingan tersebut belum ada kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pendidikan politik adalah sebuah kegiatan untuk menumbuhkan orientasi politik pada setiap individu, yaitu konsep yang terdapat muatan politiknya, kemudian mengenai loyalitas dalam berpolitik serta pengetahuan dan wawasan politik yang membuat individu tersebut memiliki kesadaran akan persoalan – persoalan politik dan sikap maupun etika dalam politik. Dengan begitu baik remaja maupun yang dewasa pun bisa menanggapi berita *hoax* tersebut secara lebih bijaksana.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan, juga bertujuan untuk membentuk kepribadian politik setiap individu. Untuk menumbuhkan kesadaran politik itulah PR bagi Partai Politik maupun KPU di setiap kabupaten maupun kota. Yang utama adalah bagi partai politik bagaimana mereka meningkatkan kesadaran berpolitik dimasyarakat. Dialog yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan dengan intensitas waktu yang lebih sering akan sangat mudah bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya politik tersebut. Pendidikan politik akan mempersiapkan individu – individu yang akan menggeluti persoalan sosial dalam kehidupan dalam bentuk partisipasi, mempersiapkan individu yang akan mengemban tanggungjawab dan memberi kesempatan bagi mereka untuk bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh *Rusadi Kantaprawira* (1988: 54) mengatakan bahwa :

“Pendidikan Politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem politiknya.”

Konsep pendidikan politik yang disosialisasikan juga memberikan dan menanamkan rasa nasionalisme dalam diri individu tersebut. Hal itulah yang akan menumbuhkan rasa tanggungjawab dan bangga akan jati diri bangsa Indonesia. Partai politik adalah elemen yang bertugas untuk memperhatikan dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Tidak hanya memperhatikan masyarakat ketika

pesta demokrasi tersebut berlangsung dan melupakannya setelah pemilu maupun pemilukada selesai tanpa ada proses evaluasi dan kegiatan yang berkelanjutan bagi masyarakat terutama mengenai pendidikan politik.

Dalam aksi nyata partai untuk melaksanakan salah satu fungsi partai yaitu mensosialisasikan pendidikan politik, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan seperti Sarasehan Bulan Bung Karno. Dalam Bulan Bung Karno selama satu bulan diadakan acara – acara yang positif termasuk sosialisasi pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat serta kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh para simpatisan partai dan pemuda.

Pendidikan politik yang dilaksanakan bagi masyarakat sendiri ada yang untuk anak sekolah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk sekolah biasanya dilaksanakan berkaitan dengan agenda partai seperti bulan Bung Karno, Hari Kesaktian Pancasila termasuk pada masa kampanye. Menurut Bapak Istana (2017) selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan acara tersebut juga mengundang secara khusus mahasiswa juga narasumber yang berkompeten dalam bidang tersebut agar memberikan materi – materi tentang pendidikan politik ini secara jelas, yaitu materi – materi yang disebutkan seperti diatas tadi seperti NKRI, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sosialisasi juga diadakan bagi pemilih pemula pada saat pemilihan umum agar tidak terjadi golput maupun *money politic*.

Diadakannya sosialisasi untuk generasi muda tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pada saat pemilu maupun pemilukada adalah pemilih pemula yang masih kurang mengerti pentingnya politik tersebut. Dan suara mereka bias disalahgunakan pihak – pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Maka kelas umum tentang pendidikan politik ini dilaksanakan untuk menumbuhkan sikap kritis dari anak – anak muda agar tidak menjadi sasaran pihak yang akan memanfaatkannya misal dengan

money politic maupun membagi – bagikan sesuatu yang menarik agar hak pilihnya bias dibeli tanpa mengetahui seberapa berkualitasnya calon yang akan dipilihnya nanti.

Bagi generasi muda, pendidikan politik ini sangat penting diberikan kepada mereka sedini mungkin. Seperti anak Sekolah Menengah Atas (SMA), selain mereka sebagai pemilih pemula juga mereka penerus bangsa yang diharapkan bisa memajukan bangsa ini. Pendidikan karakter bangsa yang disosialisasikan kepada mereka juga mengingatkan mereka dengan adat dan budaya dari bangsa ini. Penggunaan sosial media yang sangat mudah diakses sekarang ini, membuat anak bangsa lebih condong untuk menirukan segala *trend* bahkan tindak tanduk dari orang barat.

D. Pendidikan Politik melalui Dimensi Perilaku

Masyarakat dapat berperilaku politik dengan benar, sopan dan terarah sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan. Konsep pendidikan politik yang disampaikan guna meningkatkan perilaku politik yang terarah, serta tindakan partisipatif dari pemerintah untuk menunjang pendidikan politik.

Menurut Bapak Sudarto (2017) selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dan anggota DPR Provinsi Yogyakarta mengatakan bahwa :

“Konsep pendidikan politik itu sendiri merupakan sebuah hak dan tanggungjawab bagi setiap warga bangsa baik selaku pemimpin maupun dari masyarakatnya. Bagi pemimpin baik itu dari pemerintahan, anggota dewan maupun dari partai politik berkewajiban memberikan dan mensosialisasikan tentang pendidikan politik. Serta bagi masyarakat, mereka berhak mendapat pendidikan politik tersebut sehingga masyarakat sadar akan hak – haknya sebagai warga Indonesia

yang otomatis bersangkutan dengan politik itu sendiri.” (Wawancara dengan Bapak Drs. Sudarto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, 3 Juni 2017 pukul 19.30 WIB)

Terkadang masyarakat keliru atau salah dalam menerjemahkan politik tersebut sebagai sebuah kekuasaan. Sedangkan menurut Bapak Sudarto (2017) selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa :

“Politik adalah sebuah keseimbangan dari hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Di partai khususnya di PDI Perjuangan yang dikembangkan adalah kesadaran politik, termasuk kesadaran setiap individu untuk menjadi calon pemimpin maupun calon yang dipimpin. Setiap individu ditanamkan tentang pentingnya politik tersebut untuk bekal menjadi calon pemimpin maupun calon yang dipimpin, jadi keduanya akan mengetahui hak dan kewajiban masing – masing baik itu sebagai pemimpin maupun sebagai warga masyarakat yang dipimpin. Sehingga tercipta paradigma baru dimasyarakat tentang kesadaran politik. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka yang terjadi adalah tirani seperti kekuasaan – kekuasaan yang pernah terjadi di Indonesia dulu kala. Sehingga dalam kaderisasi tidak lupa disampaikan jika dalam politik itu terdapat ideologi, yaitu ideologi Pancasila.” (Wawancara dengan Bapak Drs. Sudarto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, 3 Juni 2017 pukul 19.30 WIB)

Pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk membangun karakter dari masyarakat itu sendiri serta meningkatkan ilmu pengetahuan tentang politik. Masyarakat akan lebih terbuka, rasional, kritis dan jujur dalam menanggapi keadaan politik yang terjadi. Di Kabupaten Kulon Progo, tingkat ekonominya termasuk masih rendah maka dari itu sangat mudah terjadi kecurangan – kecurangan pada saat pemilu berlangsung.

Menurut Bapak Istana (2017) selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan mengatakan bahwa :

“Konsep pendidikan politik tersebut adalah sebuah kewajiban pokok bagi partai politik yang harus diberikan kepada masyarakat juga para kader yang harus dimasukkan dalam program kerja partai. Salah satu program kerja partai adalah pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Istana, S.H, M.I.P

selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, 8 September 2017 pukul 15.30)

Adapun pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik yang diadakan oleh DPC

PDI Perjuangan:

1. Pendidikan politik formal yang diberikan adalah sekolah partai, dalam sekolah partai dari anggota, kader (seperti kader Madya Pratama dan kader Utama), simpatisan dan calon pemimpin dididik. Dalam setiap pendidikan politik yang diberikan materinya juga berbeda – beda. Isi dari materi pendidikan politik tersebut tidak jauh – jauh dari pentingnya pengembangan bagi NKRI, kebhinekaan, Pancasila dan juga Undang – Undang Dasar 1945 dan juga ideologi partai. Sekolah partai tersebut ditujukan untuk para anggota, kader dan juga para calon kepala daerah. Sekolah partai sendiri merupakan kegiatan yang diberikan oleh PDI Perjuangan pusat. Namun terkadang juga dilaksanakan sekolah partai untuk wilayah DIY.

2. Sosialisasi Pendidikan Politik

Agenda partai dalam mensosialisasikan pendidikan politik dilaksanakan dalam rentang waktu yang berbeda – beda setiap tahunnya, tetapi yang rutin adalah pada saat bulan Bulan Bung Karno dan Hari Kesaktian Pancasila serta pada saat moment – moment pemilu maupun pemilukada. Sosialisasi pendidikan politik yang belum lama ini dilaksanakan dilakukan bersama dengan anggota TNI AD dan masyarakat di Kodim Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dilaksanakan selain untuk menyampaikan tentang pendidikan politik juga untuk memperkuat rasa cinta dan bangga terhadap bangsa

Indonesia serta ideologi Pancasila yang tertanam dalam benak masyarakat.

Pendidikan politik yang disosialisasikan juga tidak terus mengenai pemilu saja akan tetapi pendidikan politik yang wajib diserukan adalah tentang Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dengan adanya sosialisasi tentang materi wajib ini, masyarakat diharapkan lebih memiliki wawasan yang luas tentang politik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan berbangga hati menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Masyarakat juga diharapkan bisa menerapkan pendidikan karakter bangsa, lebih mengenal budaya Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.

Sebenarnya pendidikan politik tidak hanya diberikan oleh partai politik saja, keluarga juga menjadi elemen penting untuk memberikan pendidikan politik terutama bagi generasi muda. Karena keluarga yang setiap hari berhubungan langsung dan bisa memberikan pencerahan – pencerahan terhadap beritayang berhubungan dengan politik yang ada baik melalui sosial media maupun televisi. Masyarakat terutama generasi muda harus *melek* terhadap politik yang artinya mereka menyadari bahwa mereka bertanggungjawab untuk menggunakan hak pilihnya secara bijaksana. Mereka juga harus menghindari dari berbagai macam kemungkinan penyalahgunaan hak, misalkan terjadinya *money politic* atau pembelian suara saat pemilu maupun pemilukada berlangsung.

Terjadinya *money politic* pada saat pesta demokrasi tersebut berlangsung bisa dikategorikan akan kurangnya kesadaran dalam rangka kegiatan politik yang jujur, bersih dan bermartabat. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri pernah terjadi dugaan *money politic* yang berlangsung di 12 dusun. Menurut Tamyus Rochman selaku ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo ditemukan pembagian kalender, biskuit dan uang

sebesar Rp 30.000 dan Rp 150.000 pada saat pemilu pada Februari 2017 yang lalu. Rendahnya kesadaran akan politik inilah yang seharusnya sesegara mungkin diperbaiki untuk generasi yang lebih baik, jujur dan bersih dalam berpolitik.

Untuk menghindari kegiatan *money politic* seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Kulon Progo, dilakukan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan berbagai cara dan kegiatan sesuai dengan partai politik yang bersangkutan. Proses pelaksanaan kegiatan ini dijalankan secara terencana, hal tersebut mencoba untuk mengajarkan kepada masing – masing individu agar perilaku dan segala tindak – tanduknya dapat sesuai dengan peraturan –peraturan yang berlaku secara sosial.

Pendidikan politik yang disampaikan oleh partai politik ini diharapkan akan menjadi pendidikan untuk membentuk individu yang nantinya akan menjadi partisipan Negara yang bertanggungjawab secara moral dan beretika yang bertujuan untuk mencapai tujuan Negara. Secara ideal pendidikan politik jangan hanya dilaksanakan pada saat moment – moment menjelang pemilu saja, namun akan terus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait sehingga masyarakat akan lebih dewasa dan cerdas dalam menanggapi keadaan politik yang terjadi, karena politik adalah sebuah seni untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih berkualitas, jujur dan baik.

Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki etika dan budaya orang timur harus selalu menjaga budaya tersebut dan tidak termakan *trend* yang bisa mengubah jati diri bangsa ini. Pendidikan politik tidak hanya serta – merta tentang keadaan politik dan pemilu yang terus disinggungkan tetapi juga tentang sosial budaya di masyarakat terutama untuk generasi muda di Indonesia. Pendidikan politik juga mencakup pendidikan tentang karakter, salah satunya dengan menanamkan rasa cinta kepada bangsa sendiri. Melalui penyampaian pendidikan politik ini generasi muda juga

diperkenalkan tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam kehidupan berbangsa dan dalam masyarakat.

Adat dan tata cara atau orang Jawa menyebutnya dengan *unggah – ungguh* sebagai warga negara Indonesia harus selalu ditumbuhkan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahtamahannya, maka dari itu seluruh masyarakat termasuk generasi muda harus selalu melestarikannya dan tidak lupa akan karakter bangsa ini. Dengan mudahnya mengakses internet dan sosial media yang sudah tidak asing lagi dikalangan remaja, mereka akan dengan mudah mengakses segala hal. Pancasila sebagai dasar negara ditanamkan dalam diri setiap individu di Indonesia terutama terhadap generasi muda supaya mereka tahu akan hak dan kewajiban mereka sebagai anak bangsa dan penerus bangsa serta mereka tidak lupa akan karakter bangsa.

Menurut *Retno Listyarti (2012 : 5)*, mengatakan bahwa:

“ Karakter lemah bangsa Indonesia yang harus diperbaiki yaitu penakut, feodal, penindas, koruptif, tidak logis, meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri sendiri, tidak disiplin, mengabaikan tanggungjawab, hipokrit, lemah kreativitas dan tak punya malu”

Karakter yang lemah tersebut harus segera diperbaiki dan diberantas dengan melalui pembentukan dan pendidikan karakter. Saat ini di Indonesia sering terjadi tindak kekerasan, kriminalitas yang semakin tinggi bahkan maraknya video yang tidak pantas beredar di internet dan dengan mudah diakses oleh masyarakat termasuk para remaja. Perbedaan pendapat dalam pemilu/kada maupun pilkada terkadang juga menciptakan benturan – benturan untuk saling menjatuhkan lawan dengan berbagai cara. Hal tersebut menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh negara ini, krisis karakter dari anak bangsa dan moral yang menurun.

Sekarang ini sangat mudah ditemukan berita mengenai pembunuhan, pencurian bahkan pembegalan yang sangat meresahkan masyarakat, hal tersebut menandakan turunnya rasa saling menghormati, menghargai dan tolong – menolong di masyarakat. Terdapat juga orang yang memiliki niat baik untuk membantu dan menolong namun disalahgunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak kriminalitas yang lain.

Maka dari itu pendidikan karakter bangsa juga sangat penting disosialisasikan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa ini, saling menghormati dan tolong – menolong tanpa ada maksud tertentu untuk melakukan tindakan kriminal serta untuk meningkatkan moral dari anak bangsa ini.

Menurut *Dony Kusuma* yang dikutip oleh *Budiharjo (2015 : 4)* mengatakan bahwa :

“Pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai – nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif dan stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur – unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi tiap individu. Idealnya, pendidikan tidak hanya bertumpu pada hasil semata. Melainkan, mengaksentuasikan pada kejujuran proses. Pendidikan pun diharapkan mampu membentuk karakter positif dalam setiap individu. Dengan karakter positif, diharapkan out put dari dunia pendidikan adalah insan cendekia yang memiliki keluhuran budi pekerti dan memiliki kecerdasan emosi yang baik.”

Pendidikan karakter terutama untuk generasi muda ini akan mudah disampaikan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam menyampaikannya. Perempuan lebih tahu bagaimana cara untuk menyampaikan pendidikan bagi anak – anak.

PDI Perjuangan memberikan kapasitas bagi perempuan untuk berkiprah dipolitik. Keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam legislatif tetapi juga harus bisa berkiprah dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Di DPD PDI Perjuangan terdapat sosialisasi

bertema “Penguatan Perempuan dalam Sistem Politik” dalam sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk kemenangan perolehan suara pada 2019 tetapi sebagai langkah partai untuk membuat program kerja agar bisa untuk selalu bersama masyarakat, hadir berjuang bersama dengan masyarakat.

Di DPRD Kabupaten Kulon Progo yang menjadi Ketua DPRD adalah seorang perempuan yaitu Ibu Akhid Nuryati dari PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo 2014 – 2019. Dengan begitu penguatan perempuan dalam sistem politik akan didukung dengan penuh.

Dengan semboyan *partainya wong cilik* ini, PDI Perjuangan khususnya di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo menciptakan program – program yang semakin mendekatkan kader – kader PDI Perjuangan dengan masyarakat. Terutama perempuan, karena perempuan akan mudah dekat dengan semua kalangan seperti remaja, ibu rumah tangga bahkan lansia. Perempuan tidak hanya mendukung dibalik layar saja, tetapi juga ikut berperan aktif dalam menyampaikan pendidikan politik untuk masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam proses pendidikan politik sangat strategis karena dapat masuk ke dalam ranah publik yang lebih luas. Dengan adanya program untuk pemberdayaan perempuan juga perlindungan perempuan dan anak, kader – kader perempuan ini terbuka untuk melakukan pendampingan program. Dengan begitu pendidikan politik bisa tersampaikan dengan terstruktur dan lebih mudah dalam pendekatan terhadap masyarakat.

Di DPC PDI Perjuangan juga terdapat agenda khusus dalam mensosialisasikan pendidikan politik ini. Bapak Sudarto mengatakan bahwa :

“ Ketika memperjuangkan rakyat maka harus dibentuk terlebih dahulu *software* nya, dalam hal ini yang dimaksud dengan *software* adalah kader – kader yang ada di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo. *Software* ini adalah *software* aspirasi yang melalui struktur partai yang nanti akan disampaikan kepada fraksi yang akan ditindaklanjuti bersama – sama dengan Kepala Daerah yang bersangkutan sehingga yang namanya aspirasi tidak tersumbat dan tidak ada tindaklanjutnya.” (Wawancara dengan Bapak Drs. Sudarto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, 3 Juni 2017 pukul 19.30 WIB)

Penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk generasi yang tahu akan politik atau “*melek politik*” PDI Perjuangan khususnya di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pendidikan politik ini juga untuk mencari kader – kader yang berkompeten. DPC PDI Perjuangan juga memfasilitasi para kadernya untuk terlibat dalam ranah politik dengan mengadakan musyawarah cabang, rapat kerja cabang, rapat kerja pilar untuk menyampaikan aspirasi dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Tiga pilar tersebut bertujuan untuk rekrutment yang nantinya didiskusikan kembali oleh para DPR dari PDI Perjuangan.

Rekrutment politik ada dalam setiap tatanan yang selalu membutuhkan keberlangsungan yang ada secara terus menerus dalam sebuah lembaga tertentu. Seiring dengan adanya kebutuhan partai politik akan dukungan kekuasaan dari semua elemen masyarakat, dengan cara turut serta dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam keanggotaan partai tertentu dalam hal ini adalah PDI Perjuangan.

Para kader dan pengurus partai secara gencar melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat untuk menarik minat mereka serta memfasilitasi kepada masyarakat yang mumpuni untuk bisa bergabung dan ikut serta dalam partai. Terdapat acuan dalam sebuah proses rekrutment itu sendiri yaitu dari

segi waktu dalam prosesnya, misalnya pada saat moment pemilu maupun regenerasi kepengurusan partai politik yang bersangkutan.

Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 118) mengatakan bahwa :

“ Rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.”

Maka rekrutment dalam partai politik sebenarnya dimaknai sebagai penyeleksian kepada setiap individu maupun sekelompok orang. Fungsi dari rekrutment itu sendiri dalam pengaplikasiannya dilaksanakan oleh partai politik dan disesuaikan dengan peraturan yang ada dari setiap partai politik yang bersangkutan. Rekrutment tidak serta merta hanya untuk mengisi jabatan dalam ranah politik saja namun juga semua elemen yang bersangkutan dengan politik. Setiap partai politik membutuhkan penyegaran dalam keanggotaannya untuk dapat bertahan juga mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

Dalam proses menyiapkan calon – calon kader yang diusung oleh setiap partai politik, biasanya ada pola dalam rekrutment yang berbeda – beda dari setiap partai politik tak terkecuali dengan apa yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo. Melalui tiga pilar yang dilaksanakan yaitu musyawarah cabang, rapat kerja cabang, rapat kerja pilar untuk menyampaikan aspirasi dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Salah satu dari tugas pokok dalam rekrutmen kader politik tersebut adalah bagaimana partai politik yang bersangkutan dapat menyediakan kader – kader yang memiliki kualitas bagus untuk bisa duduk di posisi yang dibutuhkan termasuk duduk di lembaga legislatif yaitu DPR maupun DPRD. Dengan pembekalan – pembekalan yang dilaksanakan melalui pendidikan politik ini maka akan menaikkan kualitas dari setiap kader partai politik. Pola pendidikan politik yang dilaksanakan seharusnya berdasarkan pada pembentukan setiap individu yang memenuhi kompetensi dan kualitas yang dibutuhkan.

Rekrutment untuk Kepala Daerah juga dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan. Kepala daerah yang sebelumnya belum terjun kedalam partai politik juga diberikan pendidikan politik, pemahaman kepada calon – calon Kepala Daerah. Seperti contohnya yang dilakukan terhadap Bapak Hasto Wardoyo pada pemilukada tahun 2012. Pada saat itu beliau adalah seorang PNS, pemahaman terhadap PDI Perjuangan juga masih minim. Maka dilakukan pendidikan secara khusus terhadap beliau agar setidaknya memahami betul arah dan tujuan PDI Perjuangan, siapa yang dibela dan targetnya apa saja, tujuan dari partai.

PDI Perjuangan yang memiliki semboyan “*partainya wong cilik*” dalam memilih calon kepala daerah tidak serta – merta hanya memntingkan kepentingan partai saja. Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo khususnya, dalam memilih calon kepala daerah para anggota dan kader melakukan *public hearing* kepada masyarakat terutama masyarakat kelas menengah kebawah. Dari kegiatan *public hearing* tersebut semua keinginan, kritik dan saran dari masyarakat disimpulkan menjadi satu dan diberikan kepada para calon yang ingin mendaftarkan menjadi kepala daerah. Jika tidak sesuai maka mereka harus mundur, namun jika sesuai beliau harus melaksanakannya jika terpilih menjadi kepala daerah dan

melakukan tugasnya sepenuhnya untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam partai politik mencerminkan atmosfer politik dalam suatu negara, fungsi pendidikan politik juga memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk kemajuan dari suatu negara terkait dengan partisipasi aktif setiap warga negara. Dalam mengembangkan kader, hal yang harus disampaikan adalah pembangunan integritas, melatih serta mendorong para kader untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan program partai tersebut, pelatihan keterampilan dasar dalam suatu organisasi.

Dalam Undang – Undang Partai Politik yang merekrut kader – kader maupun tokoh calon pemimpin wilayah daerah adalah partai politik, maka secara otomatis partai politik bertanggungjawab akan baik buruknya serta kualitas dari calon tersebut. Serta partai politik juga bertanggungjawab atas baik buruknya visi misi dan kinerja calon tersebut. Hal tersebut yang menjadi tugas pengurus partai untuk mengkonsolidasikan, sehingga jika terdapat pejabat partai yang kinerja tidak sesuai maka yang bertanggungjawab untuk meluruskan masalahnya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan, yaitu Bapak Sudarto. Ketua DPC bertugas untuk memberi kritik dan saran untuk memperbaiki kinerja dari pejabat partai yang bersangkutan misalnya Bupati dikarenakan Bupati di Kabupaten Kulon Progo berasal dari PDI Perjuangan selama dua periode ini.

Peran PDI Perjuangan dalam kemasyarakatan terutama dalam sosial politik ini yang masih menjadi kendala yang harus dihadapi oleh DPC PDI Perjuangan. Dengan menyandang sebagai partai pemenang dalam pemilukada di Kabupaten Kulon Progo, setiap kadernya seharusnya bisa menjadi contoh bagi warga masyarakat disekitar.

Namun masih ada satu ataupun dua kader yang tingkat kesadadrannya masih kurang. Itulah yang menjadi tugas para pengurus partai untuk mendidik dan membina mereka, sehingga nantinya bisa diterima oleh masyarakat. Yang nantinya para kader bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan aspirasi dari para anggota maupun kader PDI adalah suara dari masyarakat.

Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dari daerah dan keberlangsungan hidup dari masyarakat terutama bagi rakyat kecil. Dengan masyarakat yang mudah untuk menyampaikan aspirasinya maka akan mudah juga dalam memecahkan masalah yang terjadi. *Public hearing* yang dilaksanakan dan diminati oleh masyarakat tersebut membuktikan adanya kedekatan dari masyarakat dengan kader partai.

Sehingga masyarakat bisa menyampaikan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh kader – kader partai ini hanya untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok bukan untuk kepentingan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kader partai akan disampaikan lagi kepada para anggota dewan untuk bisa ditindaklanjuti lagi.

Pendidikan politik yang ditanamkan kepada setiap kader partai membuktikan seberapa jauh kualitas dari para kader tersebut. Sehingga para kader tersebut juga berguna bagi masyarakat luas dan menunjang kemajuan dari daerah serta menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang terjadi di masyarakat. Para anggota dewan dari PDI yang dibantu oleh kader – kader partai untuk mendengarkan aspirasi masyarakat jelas sangat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Dari setiap kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat maupun terhadap kader partai selalu menemui hambatan ataupun kendala dalam setiap pelaksanaannya. Seperti kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik terutama pada kalangan remaja maupun dari kader – kader partai yang terkadang masih terdapat satu ataupun dua kader yang tingkat kesadaran politiknya masih rendah yang bisa menghambat sosialisasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat itu sendiri. Minat kader yang kurang dan keaktifannya dalam mensosialisasikan pendidikan politik yang masih rendah bisa menghambat keterlaksanaan kegiatan ini.

Kemudian pragmatisme demokrasi saat ini, yaitu terdapat beberapa masyarakat yang tidak melihat siapa calon pemimpinnya ataupun calon legislatifnya. Tetapi berapa yang sudah diberikan calon – calon tersebut pada saat pemilu. Pola seperti ini yang terkadang masih ditemukan di masyarakat, apalagi dengan rendahnya ekonomi di daerah sangat rawan adanya kegiatan *money politic* di masyarakat. Hal – hal seperti ini yang seharusnya bisa disadarkan dengan adanya kegiatan sosialisasi pendidikan politik agar masyarakat tingkat kesadaran politiknya meningkat.

Kendala yang lain juga terkait dana, tidak semua daerah yang partai politik serta pemerintahannya mengucurkan dana khusus untuk sosialisasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat. Maka daerah – daerah yang tidak akan dana untuk sosialisasi pendidikan politik ini akan sangat menghambat berlangsungnya kegiatan tersebut. Serta tidak semua kader partai di daerah – daerah tertentu yang tergerak untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan politik ini karena kurang tahu akan pentingnya pendidikan politik di masyarakat.

Di Kabupaten Kulon Progo sendiri dari pemerintahannya ikut serta membantu dalam masalah dana khususnya untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Dana yang dikucurkan dari pemerintah bagi setiap partai politik yang dananya bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dalam hal pendidikan politik kurang lebih sekitar Rp 140.000.000,- per tahunnya. Dana tersebut 60% dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik. Kemudian sisanya untuk operasional partai.

Dengan bantuan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan politik ini ditambah dengan dana yang dimiliki oleh masing – masing partai politik diharapkan bisa menjalankan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat luas. Diharapkan juga dengan adanya sosialisasi ini masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya politik dan bisa ikut serta didalamnya.

Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat digunakan sesuai dengan aturan pemerintahan daerah, tidak bisa semata – mata digunakan tanpa mengikuti peraturan daerah yang tersedia. Bantuan dana untuk partai politik tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Bantuan dana tersebut diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik yang tercantum dalam peraturan daerah berkaitan dengan peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian

untuk peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati yaitu dilaksanakannya kegiatan pendidikan politik tersebut memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya kegiatan operasional sekretariat juga diperhatikan dalam hal administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip serta pemeliharaan peralatan kantor.

Pemberian bantuan keuangan kepada setiap partai politik yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Kulon Progo ini bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan sekretariat partai politik guna menunjang kegiatan untuk memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana yang diberikan dari pemerintahan bagi partai politik untuk menjalankan kegiatan pendidikan politik ini termasuk sebagai faktor penunjang atau pendukung adanya kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Kegiatan ini akan berjalan dengan baik jika masalah financial dan terdapatnya tokoh masyarakat yang menjadi moderator kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini. Berbagai faktor pendukung juga tersedia seperti tempat diadakannya sosialisasi dan peralatan yang digunakan untuk lebih menarik minat dari masyarakat. Dengan adanya bantuan anggaran dana dari pemerintah daerah tersebut sudah cukup membantu partai politik untuk melaksanakan fungsinya salah satunya adalah mensosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Tingkat kesadaran politik dari masing – masing kader juga mendukung terjadinya kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini, jika kesadaran politik dari para kadernya kurang maka kegiatan sosialisasi seperti ini akan terbengkalai bahkan setiap tahunnya bisa tidak diadakannya sosialisasi khususnya tentang pendidikan politik. Dengan berbagai faktor yang sudah menunjang adanya kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini seharusnya pelaksanaannya tidak terlalu berat karena dalam berbagai hal sudah tersedia. Dengan kerjasama yang baik yang ada di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo khususnya maka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik ini akan mudah terlaksana.

Jika dari pemerintah dan DPC PDI Perjuangan juga sudah memfasilitasi kegiatan pendidikan politik, namun minat masyarakat untuk mengikuti masih mini maka kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu kerjasama yang baik antar beberapa elemen ini yang akan mewujudkan masyarakat yang melek politik di Kabupaten Kulon Progo pada khususnya. Agar terdapat bibit – bibit yang memiliki kualitas terbaik untuk bangsa Indonesia dimasa mendatang untuk perkembangan NKRI menjadi lebih maju lagi.

Faktor internal yang mempengaruhi adalah dari dalam partai itu sendiri yaitu PDI Perjuangan khususnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo. Para kader partai diberikan pelatihan – pelatihan yang berguna untuk memantapkan pemahaman tentang pendidikan politik. Di PDI Perjuangan sendiri terdapat sekolah partai untuk para kadernya seperti Kader Madya Pratama, Kader Utama, simpatisan dan calon legislatif maupun calon kepala daerah. Dalam sekolah partai ini ditujukan untuk mensosialisasikan terkait dengan program – program partai politik dan juga ideologi PDI Perjuangan.

Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri dipengaruhi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat masyarakat yang pragmatis, yaitu masyarakat yang tidak melihat siapa calon pemimpinnya ataupun calon legislatifnya, tetapi berapa jumlah dana yang diberikan calon – calon tersebut. Pola seperti ini yang terkadang masih ditemukan di masyarakat, apalagi dengan rendahnya ekonomi di daerah sangat rawan adanya kegiatan *money politic* di masyarakat. Hal – hal seperti ini yang seharusnya bisa disadarkan dengan adanya kegiatan sosialisasi pendidikan politik agar masyarakat tingkat kesadaran politiknya meningkat.

Selain itu bantuan dana dari pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap berjalannya sosialisasi pendidikan politik tersebut. Bantuan dana tersebut digunakan untuk operasional partai dalam melaksanakan fungsinya salah satunya adalah mensosialisasikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Maka dari itu, pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik ini akan berjalan beriringan antara partai politik, masyarakat termasuk kader partai dan juga pemerintah yang membantu memberikan dana untuk jalannya kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat.